

Anies Ajak Warga Ibu Kota Matikan Listrik Sejam Saat Earth Hour

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengajak warga Ibu Kota untuk mematikan lampu selama satu jam guna mendukung program lingkungan Earth Hour pada Sabtu (26/3) mulai pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB. "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bergabung pada gerakan Earth Hour 2022," kata Anies dalam tayangan virtual di Instagram @dinaslhdi di Jakarta, Jumat (25/3).

Selain mematikan lampu, Anies juga mengajak masyarakat untuk mematikan alat elektronik yang tidak digunakan selama satu jam. Menurut dia, Jakarta bersama 190 negara di dunia melakukan program Earth Hour yang diadakan pada Sabtu terakhir pada Maret.

Earth Hour merupakan program satu jam untuk bumi salah satunya dengan cara hemat energi, misalnya dengan mematikan lampu dan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. "Ini aksiku. Shape our future. Untuk Indonesia untuk dunia," ucap Anies.

Program EarthHour, sambung dia, merupakan momentum pemersatu bagi masyarakat dunia untuk memperhatikan lingkungan dan bumi yang lebih lestari. "Earth Hour merupakan sebuah gerakan. Ini adalah gerakan nyata untuk sama-sama menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga masa depan bumi untuk memastikan bahwa bumi yang kita tempati ini bisa lebih lestari," kata Anies. ● yan

Sekda Kab. Bekasi Dukung Kampung Rawa Lele Jadi Desa Wisata di Cibitung

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendukung rencana pembangunan desa ramah lingkungan dengan dukungan pendanaan dari perusahaan di wilayah Kecamatan Cibitung. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, Pemkab menyambut baik program wisata dengan mempedulikan lingkungan tersebut.

"Tadi kita bersama-sama melihat lokasi-lokasi yang akan menjadi konsep dari ecovillage (desa ramah lingkungan) dan segala hal yang berkaitan dengan utilitas ataupun infrastruktur yang perlu dibenahi kita akan coba upayakan," kata Dedy di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/3).

Dia menjelaskan, pembangunan desa ramah lingkungan mencakup upaya pengelolaan sampah yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi. Untuk keperluan itu, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) dibangun guna menampung bank sampah di Kecamatan Cibitung.

Dedy berharap, ecovillage bisa menjadi pilot project atau role model bagi kecamatan

lain agar bisa diamati, ditiru, dan dimodifikasi.

"Di Kecamatan Cibitung memang sudah berjalan program bank sampah, sebagai wujud dukungan pemerintah daerah, kita sudah mendukung dengan memberikan bantuan dump truck untuk Desa Wanarasi dan Wanajaya," kata Dedy.

Camat Cibitung, Encun Sunarto menjelaskan, pengembangan Kampung Rawa Lele di Desa Wanajaya, sebagai daerah ekowisata ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kampung. Dia menargetkan, inovasi dalam pengembangan daerah ekowisata dan agrowisata Kampung Rawa Lele bisa mendatangkan poin dalam penilaian program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2022.

"Kita yakin konsep ini akan menjadi nilai lebih sebagai inovasi untuk mendukung lomba P2WKSS tingkat provinsi. Nanti kita akan lebih matangkan lagi sesuai permintaan Pak Sekda agar infrastruktur seperti jalan bisa dilebarkan lagi untuk mempermudah mobilitas di sini," kata Encun. ● yan

Pemprov DKI Jakarta Jual Minyak Goreng Murah di 92 Lokasi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjual minyak goreng kemasan serta curah dengan harga murah di 92 lokasi.

"Perumda Pasar Jaya telah berkolaborasi dengan BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia menyalurkan 8.000 liter minyak goreng per lokasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria melalui akun Instagram @arizapatria di Jakarta, Jumat (25/3).

Riza menjelaskan, penjualan minyak goreng murah tersebut di 92 gerai Perumda Pasar Jaya. Di gerai tersebut, minyak goreng merek "Garing" kemasan satu liter dengan harga Rp20.000 dan kemasan dua liter seharga Rp40.000. Penjualan minyak goreng itu juga tersebar di Pasar Enjo, Pasar Tomang Barat, Pasar Tanah Abang dan Pasar Grogol pada Rabu (16/3). Kemudian, di Pasar Palmeria, Pasar Rawamangun pada Senin (21/3) dan di Pasar Kelapa Gading, Pasar Pondok Labu, Pasar Jelambar Polri pada Jumat (25/3).

Selain itu, penjualan min-

yak goreng kemasan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia merek "Resto" ukuran dua liter seharga Rp14.000 per liter. Jumlahnya di Pasar Minggu sebanyak 200 karton dan di Pasar Palmeria sebanyak 250 karton. Kegiatan serupa juga dilakukan di Pasar Kramat Jati namun dalam bentuk curah yang dijual dalam ukuran per kilogram dengan ketersediaan sebanyak 5.000 kilogram.

Tak hanya itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) melakukan pasar murah pada Rabu (23/3) di halaman Kantor Kelurahan Ciracas. Kemudian pada Selasa (29/3) di halaman Kantor Dinas PPKUKM dan pada Selasa (12/4) di Rusun Dakota Kemayoran. Rencananya sebanyak 4.000 liter per lokasi dengan harga Rp14.000 per liter.

Berdasarkan data harga minyak goreng kuning/curah berdasarkan Info Pangan Jakarta per Jumat (25/3) harga minyak goreng curah mencapai rata-rata Rp18.974 per kilogram. Sedangkan harga tertinggi di Pasar Mayestik Rp24.000 per kilogram dan harga terendah di Pasar Tanah Abang Blok A-G mencapai Rp15.000 per kilogram. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



MENTERI BUMN KUNJUNGI SARINAH
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati (kedua kanan), Penyanyi Andien (kedua kiri) dan Pemilik Erigo Muhammad Sadad (kanan) mengamati produk yang ditawarkan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (24/3). Sarinah kembali dibuka untuk umum setelah selesai direnovasi sejak 2020 dengan 500 unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuka gerainya di pusat perbelanjaan tersebut.

Pemprov DKI akan Belanjakan Rp5,18 T untuk Produk Dalam Negeri

Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, pihaknya berkomitmen melaksanakan arahan dari Pemerintah Pusat melalui program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membelanjakan produk dalam negeri hingga Rp 5,182 triliun pada APBD Tahun Anggaran 2022.

"Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia," kata Elizabeth dalam keterangannya dikutip, Jumat (25/3).

Dia menambahkan, komitmen tersebut muncul dalam Pelaksanaan Business Matching Penggunaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, Business Matching itu dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun," ujarnya.

Berdasarkan informasi, kegiatan itu menghadirkan berbagai institusi dan lembaga. Di antaranya perwakilan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebagai bentuk komitmen

menyediakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur

yang terdaftar di platform e-Order."

"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk," ujar Ratu. ● yan

TOTALNYA MENCAPAI RP 450 MILIAR

Warga Mengaku Belum Terima Uang Pembebasan Lahan Tol Andara

DEPOK (IM) - Febri Usman, ahli waris tanah yang kini digunakan sebagai Jalan Tol Andara (Depok-Antasari) mengaku belum menerima pembayaran atas pembebasan lahan. Dari 3,6 hektar tanah milik orang tua Fabri, H Nur Usman, total ganti rugi yang belum dibayarkan senilai Rp 450 miliar.

"Terkait 3,6 hektar, kalau lihat NJOP (nilai jual obyek pajak) itu sekitar Rp 15 juta per meter, sehingga kalau kita kalikan dengan 3,6 hektar berarti sekitar Rp 450 miliar sekalian," ujar kuasa hukum Fabri, Djamiludin Koedoeboen, kepada wartawan, Kamis (24/3) kemarin.

Djamiluddin menduga, ada mafia tanah yang bermain dalam upaya pembebasan lahan milik warga untuk proyek pembuatan jalan Tol Andara.

Dugaan itu diperkuat dari hasil pemeriksaan data kepemilikan lahan yang masih atas nama ahli waris. "Infonya tanah masih terdaftar atas nama klien kami, ada SHM lalu 28 status

tanah girik letter C," ucap Djamiluddin.

Sebelumnya, Fabri berencana akan menutup Jalan Tol Andara karena persoalan tersebut. Penutupan akan dilakukan di kilometer 4,8 Tol Depok-Antasari, Senin (28/3). Lokasi itu sebelumnya tanah milik orang tua Fabri. "Penutupan jalan ini opsi terakhir. Kami dari pihak pemilik tanah mungkin mau minta maaf atas ketidaknyamanan karena tak ada opsi lainnya," kata Fabri.

Fabri mengaku sebelumnya telah berupaya bersama ahli waris lainnya untuk mendapatkan hak dari pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Tol Depok-Antasari. "Kami hanya ingin hak kami, bisa dilakukan pembayaran karena kami sudah coba berbagai macam upaya tapi tidak direspons, sehingga diambil opsi terakhir untuk tutup jalan itu," kata Fabri.

"Saya juga masih mendapatkan tagihan pajak dari tanah," kata Fabri. ● yan

Wagub Ariza Belum Tahu BUMD DKI akan Bangun Pabrik Minyak Goreng

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya belum mengetahui kabar BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya yang akan membuat pabrik minyak goreng. Menurut dia, belum ada pembicaraan lebih jauh terkait hal tersebut. "Saya belum tahu. Dan saya kira belum sejauh itu (buat pabrik)" kata Riza kepada awak media di Balai Kota DKI, Kamis malam (24/3).

Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Food Station dan melakukan pengecekan. "Nanti kita cek kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan, pihaknya berencana membuat pabrik minyak goreng saat melakukan penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng Namun, kata dia, belum ada keputusan mengenai rencana tersebut. "Iya (akan buat pabrik migor) tapi belum diputuskan karena masih melakukan pembicaraan awal pekan lalu," kata Pamrihadi kepada awak media di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3).

Dia menyebut, pembicaraan lanjutan nanti akan

membahas di mana pabrik tersebut ditempatkan. Menyual lokasi, Pamrihadi menyebut akan ideal saat dekat dengan pelabuhan. "Jadi, entah di Marunda atau di Surabaya, atau mungkin di Kendal," katanya.

Ditanya tujuan pembuatan pabrik untuk persediaan minyak goreng bagi warga Jakarta, dia menampikinya. Namun, tujuannya adalah penguatan sistem ketahanan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik wacana BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya terkait pembuatan pabrik minyak. Menurut Gembong, wacana tersebut belum jelas kajian dan semua perhitungan pembentukan sentra bisnis barunya.

"Kalau mau bangun itu perlu ada kajian, kalau mau menguntungkan atau bicara profit kan harus dilihat lebih jauh," kata Gembong ketika dihubungi.

Menurut dia, wacana pembangunan pabrik tersebut harus berdasarkan keuntungan jangka panjang. "Jangan karena ada kelangkaan terus bangun pabrik. Harus lihat kajian matang," ujarnya. ● yan

Pemkab Bekasi Serahkan Laporan Keuangan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 (Unaudited), pada Kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Tahun 2021 (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Badan Periksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (24/3).

Prosesi penyerahan LKPD diawali dengan pendaftarannya Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, dan kemudian LKPD tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekda Kabupaten Bekasi kepada Kepala Subauditorat Jawa Barat III, Anthon Merdiansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan, bahwa penyampaian laporan keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2021 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Penyampaian LKPD Unaudited kita sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kami pun siap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Jum'at (25/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali, untuk memertahankan hasil penilaian tujuh kali berturut-turut, dan akan melakukan peningkatan-peningkatan khususnya pada Perang-



FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

Penyerahan LKPD 2021 Pemerintah Kabupaten Bekasi secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Pemkab Bekasi, Dedy Supriyadi (kiri atas) kepada Kepala Subauditorat Jawa Barat III, Anthon Merdiansyah (kanan atas) di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Kamis (24/3).

kat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Pemkab Bekasi tentu akan semaksimal mungkin untuk meraih WTP kembali, karena kita sudah mendapatkan penilaian tujuh kali berturut-turut. Kedepan, akan ada peningkatan khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bekasi," pungkasnya.

Terakhir, dirinya bersama Inspektur BPKD akan memonitor secara terus menerus Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK, karena saat ini TLHP Pemerintah Kabupaten Bekasi masih dikatakan rendah dan berada di angka 77,20 persen dari target 90 persen.

"Kita masih rendah, TLHP akan kita tingkatkan lagi. Saya bersama Inspektur dari BPKD akan memonitor terus supaya ada peningkatan, mungkin hasil temuan dan lainnya agar kita bisa di atas 90 persen," katanya.

Sementara itu, menurut Penanggungjawab Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Anthon Merdiansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang masih melebihi target meskipun dalam kondisi pandemi.

"Saya pribadi mengapresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari Pemkab Bekasi, di kondisi pandemi ini masih mampu melebihi target pendapatan," jelasnya.

Sebagai informasi, pemeriksaan BPK akan dilakukan dalam 6 tahap, yakni tahapan pemeriksaan intern, penyerahan LK Unaudited, pemeriksaan terinci, penyusunan LHP, penyerahan LHP, dan tindak lanjut. Hal ini bertujuan untuk, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku serta efektivitas sistem pengendalian intern. ● mdl



IDN/ANTARA

TRADISI ZIARAH KUBUR JELANG RAMADHAN
Sejumlah umat Islam berdoa di makam keluarganya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (25/3). Sepekan jelang datangnya bulan suci Ramadhan, banyak warga yang melakukan tradisi ziarah kubur untuk mendoakan keluarganya.

**PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI
PT. RAJA PASAR ABADI (DALAM LIKUIDASI)**
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Raja Pasar Abadi, tertanggal 07 Maret 2022, Nomor 03, dibuat di hadapan Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, bahwa Perseroan telah dibubarkan dan dinyatakan dalam keadaan "Likuidasi".
Dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa perseroan telah di likuidasi dan para pemegang saham Perseroan telah menyelesaikan dan menerima semua pekerjaan dan perbuatan hukum serta laporan pertanggungjawaban Likuidator dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquiesce et discharge) tanpa ada yang dikemukakan kepada likuidator dari semua tindakan dan tanggung jawab selama proses likuidasi.
Demikian Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 26 Maret 2022
Tim Likuidator
PT Raja Pasar Abadi (Dalam Likuidasi)